

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan kualitatif mengenai pola teks pemberitaan bencana banjir Kabupaten Demak pada periode Februari-Maret 2024 di media daring nasional (*detik.com*) dan lokal (*suaramerdeka.com*). Pembahasan ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan atau sekadar menyajikan objektivitas statistik (angka/frekuensi kata), melainkan menyajikan argumentasi subjektif peneliti dalam menafsirkan *mengapa* konstruksi realitas tersebut terjadi, dengan mengaitkannya pada profil media, perkembangan teori, dan rujukan penelitian sebelumnya. Pembahasan diarahkan untuk mengelaborasi implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi sosial.

4.1 Implikasi Teoretis

4.1.1 Framing sebagai Konstruksi Interpretif Pemberitaan Bencana di Media Online

Temuan penelitian menguatkan asumsi dasar framing bahwa berita merupakan hasil seleksi, organisasi, dan penonjolan realitas. Pan dan Kosicki (1993) memahami wacana berita sebagai proses sosiokognitif yang melibatkan sumber, jurnalis, dan khalayak dalam suatu kebudayaan bersama. Artinya, fakta banjir tidak masuk ke dalam teks secara otomatis. Fakta dipilih berdasarkan nilai berita, rutinitas redaksi, akses sumber, kebutuhan audiens, dan bentuk naratif yang dianggap dapat dipahami dengan cepat. Dalam konteks penelitian ini, tanggul jebol, jumlah pengungsi, Jalan Pantura, bantuan, dan pemilu susulan merupakan fakta yang sama-sama tersedia. Namun, ketika fakta tersebut ditempatkan pada judul, dijelaskan oleh aktor tertentu, dihubungkan dengan tema tertentu, dan diperkuat oleh visual tertentu, fakta berubah menjadi konstruksi makna yang berbeda.

Pada *detik.com*, judul dan lead yang padat angka, kronologi, serta aktor resmi membentuk kesan bahwa banjir adalah krisis yang dapat dipetakan melalui ukuran konkret dan ditangani melalui kapasitas negara. Akan tetapi, bingkai tersebut tidak sepenuhnya administratif karena beberapa berita menggeser pusat cerita kepada Maskun, Ana, Saiful Hana, dan Subadi. Pengalaman berenang menggunakan galon untuk menyelamatkan keluarga, kebutuhan pakaian dalam di pengungsian, kesulitan memasak saat listrik padam, dan benih padi yang mati membuat bencana hadir sebagai gangguan terhadap martabat, rutinitas, dan sumber penghidupan. Dalam

pembacaan peneliti, kekuatan detik.com terletak pada kemampuannya menghubungkan skala makro dan pengalaman mikro, meskipun hubungan itu belum konsisten di seluruh unit berita.

Bukti tekstual yang menunjukkan hubungan skala makro dan pengalaman mikro terdapat pada artikel berita detik.com (D6) berjudul “*Seribuan Warga Demak Korban Banjir Ngungsi ke Kudus, Butuh Bantuan Pakaian*” yang terbit 10 Februari 2024 pukul 15.28 WIB. Maskun menyatakan, “*Renang pakai galon mineral ke rumah tetangga yang lebih aman*”, lalu mengungkapkan kebutuhan pengungsian dengan kalimat, “*Terutama seperti makanan full, kalau kurang itu pakaian, pakaian dalam masih butuh*”. Pada artikel detik.com yang lain (D9) berjudul “*Tanggul Sungai Wulan Jebol Lagi, Pantura Demak Lumpuh-Warga Ngungsi*” yang terbit 17 Maret 2024 pukul 22.11 WIB, Subadi menyebut, “*Kemarin MT pertama gagal, ini baru nyebar (bibit) gagal lagi ada banjir*”, kemudian meminta, “*Ya petani kalau bisa dibantu bibit lah*”. Kutipan tersebut membuat korban hadir sebagai subjek yang menjelaskan pengalaman, kebutuhan, dan kerugian mata pencahariannya sendiri, bukan hanya sebagai angka pengungsi.

Pada suaramerdeka.com, realitas banjir lebih sering diorganisasikan melalui jalur Pantura, titik kilometer, rute alternatif, *contraflow*, pembersihan fasilitas, bantuan korporasi, dan kunjungan pejabat. Pilihan ini bukan tanpa nilai publik. Informasi mobilitas dapat mengurangi risiko kemacetan, membantu distribusi logistik, dan memberi kepastian kepada pengguna jalan. Namun, ketika informasi tersebut menempati ruang dominan sementara lokasi pengungsian, pengalaman korban, dan kebutuhan pemulihan ekonomi hanya disebut secara terbatas, bencana bergeser dari krisis ruang hidup warga menjadi gangguan terhadap kelancaran mobilitas. Diksi seperti “*Lumpuh Total*” (SM9), “*Mengerikan*” (SM12), dan “*Siap-Siap Bersabar!*” (SM15) memperlihatkan bahwa perhatian pembaca diarahkan kepada kondisi jalan dan ketidaknyamanan perjalanan, bukan terutama kepada keselamatan warga yang permukimannya terendam.

Penonjolan mobilitas dapat ditelusuri pada artikel suaramerdeka.com (SM12) berjudul “*Mengerikan, Kondisi Jalan Pantura Pasca Banjir di Karanganyar Demak, Aspal Mengelupas Membahayakan Pengendara*” yang terbit 24 Maret 2024 pukul 12.09 WIB. Body berita menyebut, “*Sehingga warga yang akan menuju Kudus dari Demak dan sebaliknya harus memutar melalui Welahan Jepara*”, serta

menjelaskan bahwa “*Aspal-aspal yang sudah diangkat kemudian diletakkan di median jalan agar tidak membahayakan pengendara*”. Penekanan serupa tampak pada judul artikel *suaramerdeka.com* (SM15) berjudul “*Siap-Siap Bersabar! Skema Contraflow Diterapkan untuk Perbaikan Jalan Terdampak Banjir di Karanganyar Demak Jelang Mudik Lebaran 2024*” yang terbit 27 Maret 2024 pukul 20.57 WIB. Identitas artikel dan pilihan kalimat tersebut menunjukkan bahwa pengguna koridor Pantura menjadi audiens yang sangat terlihat dalam konstruksi bencana.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa framing tidak cukup dibaca melalui satu elemen yang terpisah. Sebuah judul dramatis belum otomatis menghasilkan bingkai sensasional jika *body* berita memberi konteks, verifikasi, dan informasi keselamatan. Sebaliknya, judul yang tampak faktual dapat tetap menghasilkan bingkai elitis jika seluruh narasinya hanya berputar pada klaim pejabat. Karena itu, nilai analitis model Pan dan Kosicki terletak pada pembacaan hubungan antarelemen. Frame menjadi terlihat ketika judul, sumber, alur 5W+1H, tema, diksi, dan visual bergerak dalam arah makna yang relatif koheren. Koherensi inilah yang menjadi dasar argumentasi kualitatif penelitian, bukan sekadar frekuensi kata atau jumlah kategori.

4.1.2 Relevansi dan Perkembangan Model Pan & Kosicki pada Ekosistem Media Digital

Penggunaan model Pan & Kosicki yang dirumuskan pada 1993 tetap relevan untuk menganalisis pemberitaan 2024 karena struktur dasar wacana berita tidak hilang ketika berita berpindah dari media cetak ke media daring. Artikel digital masih memiliki judul, *lead*, tubuh, penutup, atribusi sumber, alur 5W+1H, hubungan tematik, pilihan diksi, dan visual. Bahkan, dalam ekosistem yang dipenuhi kompetisi atensi, judul dan visual semakin menentukan sebagai pintu awal yang mengaktifkan pemaknaan pembaca. Temuan mengenai kata “runkad”, “lumpuh”, “mengerikan”, atau “kabar duka” menunjukkan bahwa fungsi penonjolan sintaksis dan retorik masih bekerja. Relevansi model ini juga terletak pada sifatnya yang konstruktivis. Informasi yang faktual dapat memperoleh arti yang berbeda ketika ditempatkan pada judul tertentu, dijelaskan oleh sumber tertentu, dihubungkan dengan tema tertentu, dan diperkuat oleh gambar tertentu.

Penelitian menggunakan model Pan & Kosicki dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak menunjukkan adanya revisi formal yang mengganti atau membatalkan empat struktur Pan & Kosicki. Perkembangan yang terlihat berupa perluasan metodologis dan kontekstual. Samsudin (2022) melalui tinjauan terhadap 38 karya penelitian framing pemilihan presiden Indonesia, menunjukkan bahwa Pan & Kosicki tetap menjadi model yang banyak digunakan, tetapi pembingkaiannya tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Ideologi media, latar belakang jurnalis dan editor, rutinitas organisasi, sumber berita, faktor ekstra-media, serta peran pemilik turut membentuk hasil pemberitaan. Temuan tersebut penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa struktur teks dapat menunjukkan bentuk frame, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh kondisi yang melahirkan frame.

Perluasan serupa tampak pada Rahmi et al. (2021) yang menggabungkan model framing Pan & Kosicki dengan analisis wacana kritis Fairclough. Model Pan & Kosicki digunakan untuk mengurai unsur tekstual, termasuk kata, kalimat, paragraf, atribusi, dan gambar, sedangkan Fairclough dipakai untuk menghubungkan teks dengan praktik diskursif serta konteks sosial-historis. Suci & Monggilo (2023) juga menggunakan model framing Pan & Kosicki sebagai perangkat untuk membongkar struktur berita, kemudian memakai konsep protest paradigm sebagai lapisan evaluatif untuk membaca representasi kerusakan dan kelompok minoritas. Kedua penelitian tersebut tidak merevisi empat struktur Pan dan Kosicki, tetapi memperlihatkan bahwa analisis framing menjadi lebih eksplanatif ketika struktur teks didialogkan dengan konteks kekuasaan atau kerangka normatif yang spesifik terhadap isu.

Dalam penelitian ini, fungsi serupa dijalankan oleh jurnalisme bencana. Pan dan Kosicki menjelaskan cara banjir dikonstruksi, sedangkan prinsip akurasi, humanis, rehabilitasi, serta kontrol dan advokasi menilai konsekuensi etik konstruksi tersebut. Berkaitan dengan framing dalam media digital, López-Rabadán (2022) menjelaskan bahwa kemunculan media sosial membentuk lingkungan komunikasi hibrida dan mengubah aktor, dinamika, serta tahapan pembentukan frame. Frame tidak lagi berhenti pada produk artikel yang telah diterbitkan, tetapi dapat diproduksi ulang melalui kutipan, unggahan ulang, komentar, tagar, potongan video, dan interaksi antar akun. Dari sudut ini, Pan dan Kosicki tetap kuat untuk membaca frame

yang terwujud pada satu teks berita, tetapi kurang memadai apabila digunakan sendirian untuk menjelaskan bagaimana frame berubah setelah beredar. Analisis artikel utama perlu dibedakan dari analisis frame dalam posting media sosial, tanggapan pengguna, atau konten turunan karena masing-masing dapat menyeleksi kembali aspek yang berbeda dari berita asal.

Karlsson et al. (2022) membedakan tiga logika *gatekeeping* dalam distribusi berita daring, yaitu *publishing* oleh organisasi media, *sharing* oleh aktor sosial, dan *spreading* oleh algoritma platform. Perbedaan ini menunjukkan bahwa visibilitas suatu frame tidak hanya ditentukan oleh redaksi. Setelah artikel dipublikasikan, pengguna memilih apa yang dibagikan, sedangkan platform mengatur penyebaran melalui sistem kurasi yang tidak identik dengan nilai berita redaksional.

Studi Khotimah & Busthomy (2024) terkait visual dan multimodal framing menunjukkan elastisitas Pan dan Kosicki ketika diterapkan pada program editorial televisi dengan memasukkan gambar dan video sebagai penguat struktur retorik. Namun, penelitian multimodal yang lebih mutakhir memperlihatkan bahwa visual tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan atau ketidakhadirannya. Xu & Löffelholz (2021) menganalisis pembentukan frame melalui isi teks, denotasi visual, dan hubungan teks-gambar; visual dapat berfungsi melengkapi, mendramatisasi, mengelaborasi, atau sekadar mengilustrasikan pesan. Geise & Xu (2025) melalui tinjauan sistematis terhadap 552 artikel dan pendalaman 72 studi empiris, juga menunjukkan bahwa unsur visual lama terpinggirkan dalam penelitian framing, padahal gambar bekerja melalui dimensi sensorik, afektif, kognitif, dan perilaku. Dengan demikian, kategori visual images dalam struktur retorik Pan dan Kosicki perlu dioperasionalkan secara lebih rinci dalam lingkungan digital.

Bagi penelitian ini, perluasan multimodal berarti foto banjir tidak hanya dibaca sebagai bukti adanya peristiwa. Analisis perlu mempertimbangkan objek yang dibuat terlihat dan tidak terlihat, jarak pengambilan gambar, sudut kamera, ukuran figur korban, posisi pejabat atau alat berat, sumber foto, keterangan foto, serta kesesuaian antara gambar dan narasi. Foto jarak jauh dapat mengurangi eksploitasi wajah korban, tetapi juga dapat membuat penyintas menjadi massa anonim. Sebaliknya, foto bantuan yang berpusat pada pejabat dapat memperkuat frame performa kelembagaan meskipun teks menyatakan kepedulian terhadap korban. Pada materi

video, urutan adegan, gerak, suara, teks layar, dan proses pemotongan juga dapat membentuk frame yang tidak sepenuhnya tertangkap melalui analisis artikel tertulis.

Penelitian Humayun & Ferrucci (2022) berkaitan dengan penggunaan konten media sosial dalam produksi berita dengan menelaah lebih dari 150 studi, mengelompokkan penggunaan media sosial oleh jurnalis ke dalam konstruksi berita, diseminasi berita, dan branding. Klasifikasi tersebut menegaskan bahwa media sosial bukan hanya saluran distribusi, tetapi juga ruang pencarian sumber dan bahan berita. Perubahan ini memperluas persoalan framing karena materi dari warga, akun agregator, atau video viral telah membawa pilihan sudut pandang sebelum masuk ke ruang redaksi. Ketika jurnalis mengutip materi tersebut, frame yang tampil merupakan hasil seleksi bertingkat: seleksi oleh pembuat konten, akun yang mengunggah ulang, jurnalis yang mengutip, editor yang menyusun berita, dan platform yang menyebarkannya. Persoalan tersebut terlihat pada artikel *suaramerdeka.com* (SM12) yang berjudul “*Mengerikan, Kondisi Jalan Pantura Pasca Banjir di Karanganyar Demak, Aspal Mengelupas Membahayakan Pengendara*” yang menulis, “*Melansir IG undercover.id, 24 Maret 2024, kondisi itu terjadi di depan SDN Karanganyar 1,*” serta, “*Dalam video yang diunggah, terlihat banjir masih tersisa sebagian.*” Pan dan Kosicki dapat menjelaskan bahwa video tersebut berfungsi sebagai perangkat penggambaran retorik dan mendukung bingkai kerusakan jalur Pantura. Akan tetapi, model tersebut tidak menyediakan prosedur khusus untuk menguji sumber informasi. Giomelakis et al. (2023) menunjukkan pentingnya konteks daring dan sinyal verifikasi dalam pemeriksaan video yang berasal dari media sosial. Karena itu, analisis dan praktik jurnalistik perlu menanyakan akun sumber pertama, identitas perekam, lokasi dan waktu perekaman, kemungkinan penyuntingan, konteks sebelum dan sesudah klip, serta konfirmasi silang dengan reporter atau otoritas teknis.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini mengusulkan perluasan berlapis, bukan revisi formal terhadap Pan dan Kosicki. Lapisan pertama adalah struktur teks, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik sebagai inti analisis. Lapisan kedua adalah multimodalitas, yang membaca relasi teks, foto, video, caption, dan unsur audio-visual. Lapisan ketiga adalah produksi dan provenance, yang menelusuri asal sumber, proses verifikasi, serta transformasi konten warga menjadi berita. Lapisan keempat adalah platform dan sirkulasi, yang membedakan artikel asli dari

versi yang dibagikan dan disebarkan algoritma. Lapisan kelima adalah evaluasi normatif jurnalisme bencana untuk menilai akurasi, martabat korban, orientasi pemulihan, serta akuntabilitas. Perluasan ini mempertahankan kekuatan Pan dan Kosicki dalam menyediakan bukti tekstual yang sistematis, tetapi mencegah teori tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan yang berada di luar kapasitas datanya.

Penggunaan Pan dan Kosicki bukan karena model tersebut dianggap sempurna atau berlaku tanpa batas pada semua bentuk media digital. Model ini dipilih karena sesuai dengan unit analisis berupa artikel berita dan memungkinkan hubungan antara judul, sumber, 5W+1H, tema, diksi, dan visual ditelusuri secara transparan. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa model tersebut masih produktif, tetapi penggunaannya perlu disertai pembatasan dan perluasan kontekstual. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang sah berada pada tingkat konstruksi teks dan visual artikel. Motif redaksional memerlukan wawancara atau etnografi ruang berita; sirkulasi dan visibilitas memerlukan data platform; perubahan frame lintas kanal memerlukan analisis komparatif posting; sedangkan efek pada khalayak memerlukan studi resepsi atau eksperimen. Penempatan batas tersebut justru memperkuat konsistensi paradigma interpretif karena peneliti membedakan secara tegas antara makna yang dapat ditelusuri dari teks dan proses digital yang masih memerlukan data tambahan

4.1.3 Perbedaan Frame Detik.com dan Suaramerdeka.com

Perbedaan frame kedua media dapat dijelaskan melalui pertemuan antara orientasi audiens, sejarah organisasi, ritme produksi, dan cara kedekatan dengan lokasi bencana diterjemahkan ke dalam praktik jurnalistik. Profil resmi *detik.com* menempatkan media ini sebagai portal digital dengan konsep breaking news dan misi “*Fastest, Trusted & Independent*” yang menekankan kecepatan, akurasi, independensi, keberimbangan, serta penyajian yang lugas dan informatif (Detikcom, 2021). Karakter tersebut terlihat pada kepadatan data, pembaruan kronologis, pemetaan lokasi, dan pantauan lapangan. Bagi audiens nasional yang tidak mengalami langsung banjir Demak, angka pengungsi, ketinggian air, kondisi Pantura, dan respons pejabat menjadi perangkat cepat untuk memahami skala krisis.

Temuan juga memperlihatkan *trade-off* dari logika *breaking news*. Kecepatan dan kebutuhan menyediakan kepastian administratif mendorong *detik.com* bergantung pada BNPB, BPBD, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga teknis

sebagai sumber yang dianggap otoritatif. Ketergantungan tersebut memberi stabilitas faktual, tetapi berpotensi menyederhanakan konflik kepentingan dan menempatkan klaim institusi sebagai kesimpulan. Ketika tanggul Sungai Wulan dilaporkan “jebol lagi” dan aspal yang relatif baru dilaporkan mengelupas, detik.com memiliki bahan empiris untuk mengembangkan pertanyaan kritis. Akan tetapi, berita berhenti pada pelaporan kerusakan dan progres penanganan. Dalam pembacaan peneliti, misi tercepat dan terpercaya baru terwujud pada tingkat informasi kejadian, belum sepenuhnya berkembang menjadi kepercayaan yang dibangun melalui verifikasi silang dan pengawasan kekuasaan.

Basis empiris bagi kritik terhadap fungsi pengawasan tampak pada artikel detik.com *“Tanggul Sungai Wulan Jebol Lagi, Pantura Demak Lumpuh-Warga Ngungsi”* yang terbit 17 Maret 2024 pukul 22.11 WIB, yang membuka berita dengan kalimat, *“Tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak jebol lagi dini hari tadi. Sebelumnya, tanggul tersebut jebol pada 8 Februari 2024.”* Artikel *“Begini Penampakan Jalur Pantura yang Rungkad gegara Banjir Demak”* yang terbit 25 Maret 2024 pukul 20.04 WIB, juga mencatat, *“Padahal aspal di ruas jalur Pantura Semarang-Demak Km 44 hingga 45 itu terbilang masih baru.”* Namun, kedua teks bergerak menuju uraian dampak dan progres perbaikan tanpa menanyakan kualitas perbaikan tanggul sebelumnya atau mutu proyek aspal kepada pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kelemahan watchdog bukan disebabkan ketiadaan fakta awal, tetapi karena fakta tersebut tidak dikembangkan menjadi pertanyaan akuntabilitas.

Detik.com juga menunjukkan bahwa media skala nasional tidak selalu jauh dari pengalaman lokal. Kehadiran reporter di lapangan menghasilkan kedekatan jurnalistik yang lebih kuat dibandingkan kedekatan administratif semata. Kisah Maskun dan Subadi memperlihatkan bahwa jarak geografis antara pusat media dan lokasi bencana dapat diperkecil melalui praktik peliputan yang memberi waktu kepada penyintas untuk berbicara. Hal ini penting karena profil media tidak menentukan frame secara mekanis. Skala nasional memang mendorong penekanan pada magnitude dan respons negara, tetapi keputusan reporter untuk turun ke pengungsian dapat membuka sub-frame kemanusiaan yang tidak hadir dalam siaran pers.

Suaramerdeka.com memiliki sejarah dan identitas yang menekankan filosofi Jawa gemi, setiti, nastiti, ngati-ati, yang diterjemahkan sebagai efisien, cermat, matang dalam pertimbangan, dan waspada terhadap dampak informasi. Media ini juga menyatakan diri sebagai penyaji informasi yang aktual, faktual, dapat dipercaya, tidak bias makna, dan dekat dengan komunitas pembaca. Visi perusahaan diarahkan pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat (*Suaramerdeka.com*, n.d.). Secara normatif, identitas tersebut memberi dasar kuat bagi liputan bencana yang kontekstual, hati-hati, dan berpusat pada komunitas.

Temuan penelitian justru memperlihatkan sebuah kontradiksi. Kedekatan geografis *suaramerdeka.com* dengan Demak tidak otomatis menghasilkan kedekatan diskursif dengan korban. Kedekatan regional lebih banyak dioperasionalkan sebagai layanan mobilitas berupa informasi jalur Pantura, titik kerusakan aspal, rute alternatif, jadwal *contraflow*, serta performa aparat dan korporasi. Pada satu sisi, orientasi ini sesuai dengan fungsi media lokal sebagai penyedia informasi praktis. Pada sisi lain, suara korban menjadi tipis, lokasi pengungsian tidak selalu dijelaskan secara operasional, dan sumber media sosial digunakan tanpa konfirmasi lapangan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedekatan (*proximity*) bukan sifat yang melekat pada lokasi media, melainkan hasil kerja jurnalistik. Temuan ini selaras dengan penelitian Nasution et al. (2025) yang menemukan bahwa tiga media lokal Lampung cenderung berhenti pada kronologi, lemah dalam edukasi kesiapsiagaan, serta kurang mengawal rehabilitasi dan akuntabilitas pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan lokal tidak otomatis berubah menjadi peliputan mendalam. Kedekatan menjadi sumber daya potensial, bukan jaminan mutu, yang dapat diimplementasikan melalui pelaporan lapangan, keberagaman sumber, verifikasi, dan kesinambungan liputan.

Perbedaan kedua media, dengan demikian, tidak cukup dijelaskan melalui dikotomi nasional dan lokal. Faktor yang lebih menentukan adalah bentuk kedekatan yang diproduksi. *Detik.com* memiliki jangkauan nasional, tetapi dalam beberapa berita menghasilkan kedekatan empiris melalui observasi dan wawancara penyintas. *Suaramerdeka.com* memiliki kedekatan geografis, tetapi sebagian liputannya menghasilkan jarak sosial karena bergantung pada pejabat, siaran pers, dan konten viral. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas framing bencana lebih tepat dipahami sebagai hasil hubungan antara akses lapangan, keragaman sumber, orientasi audiens,

tekanan kecepatan, dan pilihan editorial, bukan sebagai konsekuensi otomatis dari status media.

4.1.4 Integrasi Framing Pan & Kosicki dan Jurnalisme Bencana Sebagai Kebaruan Analisis

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penggunaan model Pan dan Kosicki dan prinsip jurnalisme bencana sebagai dua lapis analisis yang saling melengkapi. Analisis framing menjelaskan mekanisme konstruksi realitas, sedangkan jurnalisme bencana menafsirkan implikasi etis dari konstruksi tersebut melalui prinsip akurasi, prinsip humanis, prinsip komitmen menuju rehabilitasi, dan prinsip control dan advokasi. Tanpa adanya framing, tafsiran implikasi etis jurnalisme bencana mudah berubah menjadi penilaian normatif yang tidak menunjukkan lokasi tekstual masalah. Tanpa jurnalisme bencana, framing berisiko berhenti pada deskripsi perbedaan gaya bahasa tanpa menilai dampaknya terhadap keselamatan, martabat korban, pemulihan, dan akuntabilitas. Integrasi ini memungkinkan penelitian bergerak dari pertanyaan “bagaimana berita disusun” menuju “apa konsekuensi dari cara penyusunan tersebut”.

Prinsip akurasi termanifestasi terutama dalam struktur sintaksis dan skrip. Pada struktur sintaksis, akurasi dapat dibaca dari ketepatan judul, kejelasan atribusi, posisi sumber, konsistensi data antara lead dan body, serta keberadaan koreksi atau konteks tambahan pada tail. Pada struktur skrip, akurasi tidak cukup dinilai dari hadirnya unsur 5W+1H. Unsur *why* dan *how* harus menjelaskan sebab dan proses secara memadai. Temuan bahwa kedua media banyak berhenti pada “hujan deras” dan “tanggul jebol” menunjukkan bahwa berita dapat lengkap secara gramatikal, tetapi belum lengkap secara pengetahuan risiko. Kelengkapan substantif menuntut pertanyaan mengenai kualitas tanggul, perawatan, drainase, penurunan tanah, kesiapsiagaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Pendangkalan unsur *why* terlihat dari rumusan penyebab dalam data mentah. Artikel *detik.com* “*Banjir di Karanganyar Demak Capai 2 Meter, Lansia dan Anak-anak Dievakuasi*” yang terbit 8 Februari 2024 pukul 18.57 WIB, membuka berita dengan keterangan bahwa banjir terjadi “*akibat tanggul Sungai Wulan jebol*”. Pada artikel *suaramerdeka.com* “*Banyak Warga Terjebak di Rumah, BPBD Jateng Fokus Evakuasi Korban Banjir di Demak*” yang terbit 9 Februari 2024 pukul 17.12 WIB, Nana Sudjana menyatakan, “*Ada bencana banjir di Grobogan (lalu di Demak)*”

karena hujan dengan intensitas tinggi sehingga terjadi luapan air sungai dan tanggul sungai jebol”. Kedua kutipan tersebut memberi sebab langsung, tetapi belum menelusuri mengapa tanggul gagal, bagaimana pemeliharannya, dan lembaga mana yang bertanggung jawab. Di sinilah perbedaan antara kelengkapan 5W+1H secara formal dan kelengkapan pengetahuan risiko secara substantif.

Prinsip humanis hadir pada keempat struktur. Dalam struktur sintaksis, humanisme terlihat dari siapa yang masuk ke judul dan lead serta siapa yang memperoleh ruang kutipan dalam *body*. Dalam struktur skrip, unsur *who* menentukan apakah korban diposisikan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan agensi atau hanya sebagai angka. Dalam struktur tematik, humanisme muncul ketika pengalaman korban dihubungkan dengan kebutuhan, hak, dan kerentanan sosial, bukan hanya ditempelkan sebagai kisah sedih. Dalam struktur retorik, pilihan penggambaran dan visual menentukan apakah media menghormati martabat korban atau mengubah penderitaan menjadi komoditas. *Detik.com* lebih berhasil ketika pengalaman Maskun dan Subadi menjadi pusat makna, sedangkan *suaramerdeka.com* lebih lemah ketika korban hanya berfungsi sebagai latar bagi penyerahan bantuan.

Prinsip komitmen menuju rehabilitasi paling jelas terlihat dalam struktur tematik, tetapi jejaknya juga dapat ditemukan dalam skrip dan sintaksis. Tema rehabilitasi menuntut kesinambungan dari fase darurat menuju pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian. Unsur *how* harus menjelaskan bagaimana korban mengakses bantuan, kapan program tersedia, ke mana harus menghubungi, dan apa syaratnya. Tail dapat menjadi ruang *actionable information* berupa nomor posko, alamat distribusi logistik, prosedur evakuasi, atau kanal pengaduan. Temuan menunjukkan bahwa *detik.com* telah membuka isu bantuan bibit padi dan kebutuhan dasar, sedangkan *suaramerdeka.com* pernah memuat nomor darurat dan peringatan BMKG. Namun, informasi tersebut belum menjadi pola yang konsisten dan sering berhenti sebelum menyediakan kanal tindakan.

Perbedaan antara penyebutan kebutuhan dan informasi yang dapat ditindaklanjuti terlihat pada dua artikel. Dalam artikel *detik.com* “*Tanggul Sungai Wulan Jebol Lagi, Pantura Demak Lumpuh-Warga Ngungsi*” yang terbit 17 Maret 2024 pukul 22.11 WIB, Subadi menyampaikan kebutuhan pemulihan pertanian

dengan pernyataan, “*Ya petani kalau bisa dibantu bibit lah,*” tetapi teks tidak menyertakan kanal program atau mekanisme memperoleh bantuan bibit. Sebaliknya, artikel *suaramerdeka.com* “*Banyak Warga Terjebak di Rumah, BPBD Jateng Fokus Evakuasi Korban Banjir di Demak*” yang terbit 9 Februari 2024 pukul 17.12 WIB, menutup berita dengan informasi, “*Bagi warga Demak yang butuh bantuan darurat bisa menghubungi BPBD setempat di nomor telepon: (0291) 682200*”, disertai nomor BPBD Kudus dan posko aduan BPBD Jateng. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa komitmen rehabilitasi dan layanan publik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menyediakan solusi tindakan yang dapat digunakan pembaca.

Prinsip kontrol dan advokasi dapat ditelusuri melalui atribusi sumber, kedalaman *why* dan *how*, penggunaan *exemplar*, hubungan tematik, serta retorika akuntabilitas. Ketika berita menyebut tanggul jebol pada titik yang sama dengan bulan sebelumnya, *exemplar* historis seharusnya menjadi dasar untuk menguji kualitas perbaikan dan tanggung jawab institusi. Ketika aspal baru rusak, berita seharusnya menanyakan standar proyek dan penggunaan anggaran. Ketika ribuan hektare sawah dan tambak terendam, tema seharusnya bergerak menuju skema kompensasi, pemulihan usaha, dan keberlanjutan pangan. Kegagalan kedua media untuk mengembangkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa fungsi *watchdog* menjadi lemah karena data tidak diubah menjadi pertanyaan akuntabilitas.

Integrasi dua kerangka menghasilkan temuan penting bahwa satu elemen teks dapat memenuhi satu prinsip tetapi melemahkan prinsip lain. Judul “*Mengerikan*” dapat menarik perhatian dan memberi peringatan, tetapi berisiko menonjolkan ketakutan jika tidak diikuti konteks. Foto *long shot* dapat menjaga martabat korban, tetapi tetap menghasilkan dehumanisasi apabila korban hanya tampak sebagai latar belakang anonim. Informasi *contraflow* dapat akurat dan berguna, tetapi tidak humanis apabila keselamatan pengguna jalan selalu diprioritaskan dibandingkan warga yang memerlukan evakuasi. Dengan demikian, kualitas jurnalisme bencana dapat dinilai melalui multi indikator yang mencakup hubungan antar elemen yang perlu dinilai secara simultan.

Dari integrasi tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan tentang koherensi etis framing. Koherensi etis berarti keselarasan antara struktur penyajian berita dan tujuan sosial peliputan bencana. Berita memiliki koherensi etis ketika judul tidak

menyesatkan, sumber diverifikasi dan beragam, penyintas memperoleh ruang yang bermartabat, tema menghubungkan kejadian dengan pemulihan dan penyebab struktural, serta informasi memberi kemungkinan tindakan. Sebaliknya, berita dapat koheren secara naratif tetapi tidak koheren secara etis, misalnya ketika seluruh unsur secara konsisten memuji respons institusi tanpa memeriksa klaimnya. Konsep ini memperjelas bahwa framing bukan hanya persoalan teknik penyusunan makna, tetapi juga distribusi perhatian, suara, dan tanggung jawab.

4.1.5 Dimensi Politis dan Institusional dalam Pemberitaan Banjir Demak 2024

Faktor politis dalam penelitian ini tidak dipahami secara sempit sebagai keberpihakan kepada partai atau kandidat. Dimensi politis muncul dalam pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan bencana, menentukan penyebab, menilai keberhasilan penanganan, dan menetapkan kebutuhan publik. Ketika pejabat, aparat, dan korporasi mendominasi kutipan, mereka memperoleh kewenangan diskursif untuk menjelaskan realitas. Korban tetap hadir, tetapi sering sebagai angka, penerima bantuan, atau latar visual. Dalam kondisi demikian, berita dapat terlihat netral karena bersumber resmi, padahal distribusi suara di dalamnya memiliki konsekuensi politik.

Pada *detik.com*, dominasi sumber resmi memberi legitimasi pada narasi bahwa krisis sedang dikelola melalui pengerahan aparat, pembangunan tanggul, dan perbaikan jalan. Pada *suaramerdeka.com*, narasi seremonial bantuan dan operasi pembersihan memperkuat citra institusi sebagai aktor utama pemulihan. Praktik ini tidak selalu menunjukkan propaganda yang disengaja. Penelitian tidak memiliki data produksi untuk menyimpulkan adanya instruksi politik atau campur tangan pemilik. Namun, secara tekstual, ketergantungan pada sumber resmi menghasilkan *state-centric framing*, yaitu bingkai yang menempatkan negara dan lembaga sebagai pusat tindakan, sementara warga lebih sering menjadi objek yang ditangani.

Bentuk pemingkakan yang berpusat pada institusi terlihat pada artikel *suaramerdeka.com* “*BNI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Demak, dari Pakaian, Selimut, Obat-obatan hingga Vitamin*” yang terbit 12 Februari 2024 pukul 06.05 WIB. Penilaian mengenai bantuan seluruhnya disampaikan oleh Area Head 1 BNI Kantor Wilayah 05 Semarang, antara lain melalui pernyataan, “*Semoga saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Karanganyar bisa sedikit terbantu dengan bantuan yang kami berikan,*” dan, “*Kami berkoordinasi*

dengan PMI dan BPBD Kabupaten Demak untuk mengetahui kondisi terkini dan kebutuhan bantuan yang diperlukan bagi korban banjir agar tepat sasaran.” Artikel tersebut tidak memuat kutipan langsung penerima bantuan untuk menilai kecukupan atau ketepatan bantuan. Akibatnya, makna keberhasilan bantuan dibangun terutama melalui definisi pihak pemberi, bukan pengalaman pihak penerima.

Dalam keadaan darurat, otoritas memang memiliki data, sumber daya, dan tanggung jawab formal yang perlu diketahui publik. Mengutip BPBD, BMKG, kepolisian, atau pemerintah daerah merupakan bagian penting dari akurasi. Masalah muncul ketika otoritas menjadi sumber tunggal dan klaimnya tidak diperiksa melalui pengalaman warga, ahli independen, atau bukti lapangan. Pada titik itu, fungsi informasi berubah menjadi legitimasi. Berita lebih banyak menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah daripada menilai apakah tindakan tersebut memadai, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kelemahan *watchdog* pada kedua media juga menghasilkan depolitisasi bencana. Banjir yang berulang dibaca sebagai akibat hujan dan tanggul jebol, sementara keputusan anggaran, kualitas infrastruktur, perubahan tata ruang, pemeliharaan sungai, dan perlindungan mata pencaharian tidak memperoleh porsi memadai. Antunes et al. (2022) mengingatkan bahwa pelaporan yang hanya berfokus pada dampak dan bantuan dapat menaturalisasi bencana. Sejalan dengan Tierney et al. (2006), bencana perlu dipahami sebagai hasil pertemuan bahaya alam dengan proses sosial, politik, dan kelembagaan yang membentuk kerentanan. Ketika proses tersebut tidak dibahas, kegagalan tata kelola tampak seperti nasib alam yang tidak memiliki pihak bertanggung jawab. Pola pembingkai ini berkontribusi pada normalisasi banjir sebagai bencana alam dan membatasi perhatian publik pada kebutuhan akan akuntabilitas struktural (Octavian et al., 2026).

Dimensi politis juga terlihat pada bias mobilitas. Peringatan dini dan solusi praktis *suaramerdeka.com* banyak diarahkan kepada pemudik, pengendara, dan arus logistik. Audiens tersebut penting, tetapi dominasi mereka menciptakan hierarki keselamatan: kelancaran orang yang melintas dibuat lebih terlihat dibandingkan keselamatan warga yang tinggal di wilayah terendam. Peneliti memaknai pola ini sebagai bias mobilitas, yaitu kecenderungan menjadikan kemampuan bergerak di jalan sebagai ukuran utama keberhasilan penanganan bencana. Bias tersebut

berpotensi menggeser prioritas dari pemulihan ruang hidup, lahan pertanian, pendidikan, dan kesehatan menuju pemulihan koridor transportasi.

Orientasi kepada pengguna jalan dinyatakan secara langsung dalam artikel suaramerdeka.com “*Siap-Siap Bersabar! Skema Contraflow Diterapkan untuk Perbaikan Jalan Terdampak Banjir di Karanganyar Demak Jelang Mudik Lebaran 2024*” yang terbit 27 Maret 2024 pukul 20.57 WIB. Pada bagian penutup, teks menyebut, “*Pemkab Demak berharap pemudik dapat memahami dan bersabar atas ketidaknyamanan yang sifatnya sementara ini,*” kemudian menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan “*demi kelancaran dan keselamatan bersama dalam perjalanan mudik Lebaran 2024.*” Identifikasi pemudik sebagai publik yang secara eksplisit disapa memperlihatkan bahwa solusi dan peringatan dalam artikel diarahkan terutama kepada keselamatan mobilitas jalan, bukan kepada kebutuhan evakuasi atau pemulihan warga yang tinggal di wilayah terendam.

Dengan demikian, faktor politis dalam framing bencana terletak pada distribusi visibilitas dan tanggung jawab. Media tidak hanya memilih fakta, tetapi juga menentukan publik mana yang dianggap utama, kebutuhan mana yang memperoleh urgensi, dan aktor mana yang dapat berbicara tanpa ditantang.

4.1.6 Perbandingan Hasil Temuan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Konseptual

Temuan penelitian ini memperluas kajian framing banjir yang sebelumnya lebih banyak membandingkan media nasional atau berfokus pada wilayah dengan sorotan nasional. Harnia et al. (2021), Wardyaningrum (2022), dan Mufidah (2026) menunjukkan bahwa media menyeleksi aspek tertentu dari banjir dan membangun realitas melalui judul, sumber, serta penekanan isu. Penelitian ini mengonfirmasi mekanisme tersebut, tetapi menambahkan perbandingan antara media nasional dan media lokal pada isu yang dipasangkan secara relatif setara. Hasilnya menunjukkan bahwa status lokal tidak otomatis menghasilkan liputan yang lebih dekat dengan korban, sedangkan status nasional tidak otomatis menghasilkan jarak kemanusiaan.

Temuan mengenai dominasi sumber resmi sejalan dengan Kartinawati (2022) yang menyoroti persoalan dominasi sumber dan rendahnya keragaman isi dalam peliputan bencana. Pada penelitian ini, dominasi tersebut memiliki bentuk berbeda. detik.com cenderung menggunakan sumber resmi untuk membangun kepastian administratif, sedangkan suaramerdeka.com menggabungkan pejabat, korporasi, dan

konten media sosial. Keduanya menghasilkan masalah representasi: suara penyintas tidak selalu hadir sebagai pembanding yang setara, dan klaim keberhasilan bantuan jarang diuji dari perspektif penerima.

Temuan tentang lemahnya rehabilitasi dan edukasi juga sejalan dengan Nasution et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemberitaan bencana daring masih sering terbatas pada kronologi, kurang mendalam dalam analisis, dan belum optimal dalam pelaporan pemulihan. Penelitian ini memperdalam penjelasan tersebut dengan menunjukkan lokasi tekstual kelemahan. Pendangkalan terjadi pada unsur *why* dan *how*, pada tema yang berhenti di fase darurat, pada *tail* yang tidak konsisten menyediakan informasi tindakan, serta pada *exemplar* yang tidak dikembangkan menjadi evaluasi kegagalan berulang. Dengan kata lain, kelemahan rehabilitasi bukan hanya kekurangan topik pascabencana, tetapi juga kegagalan struktur berita menghubungkan dampak, kebutuhan, solusi, dan akuntabilitas.

Temuan mengenai suara korban mendukung Englund et al. (2022) bahwa penyintas mengharapkan media memberi ruang yang bermartabat terhadap pengalaman mereka. Dalam penelitian ini, *detik.com* menunjukkan praktik yang lebih mendekati prinsip tersebut melalui beberapa wawancara penyintas. Namun, bahkan pada *detik.com*, suara warga belum menjadi pola dominan dan sering tidak diikuti klarifikasi kepada pemerintah. *Suaramerdeka.com* lebih sering menampilkan korban sebagai objek bantuan. Hal ini memperlihatkan bahwa memberi nama atau memasukkan foto korban belum cukup karena humanisme memerlukan agensi, yaitu kesempatan bagi penyintas untuk menjelaskan pengalaman, menilai penanganan, dan menyatakan kebutuhannya sendiri.

Studi jurnalisisme bencana yang dilakukan Salamah et al. (2023) dan Ratuloli et al. (2023) menilai fungsi sosial media, tetapi tidak selalu menunjukkan bagaimana fungsi itu dibangun melalui struktur teks. Penelitian ini menjembatani celah tersebut. Prinsip akurasi, humanis, rehabilitasi, serta kontrol dan advokasi diterjemahkan ke dalam indikator sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Kontribusi metodologisnya terletak pada kemampuan menghubungkan norma dengan bukti tekstual sehingga penilaian etik tidak bersifat abstrak.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan tiga rumusan yang bersumber dari temuan. Pertama, paradoks kedekatan geografis, yaitu kondisi ketika media lokal dekat secara wilayah tetapi jauh secara representasional karena suara korban tidak

menjadi pusat narasi. Kedua, bias mobilitas, yaitu kecenderungan memprioritaskan kelancaran jalur dan keselamatan pengguna jalan dibandingkan kebutuhan warga terdampak. Ketiga, jurnalisme pelaporan tanpa pengawasan, yaitu situasi ketika media memiliki data kerusakan dan indikasi kegagalan berulang, tetapi tidak mengubahnya menjadi pertanyaan kritis kepada pemegang kekuasaan. Ketiga rumusan ini bersifat konseptual dan kontekstual, bukan generalisasi universal, tetapi dapat menjadi sensitizing concepts bagi penelitian bencana di media lain.

Kontribusi teoretis penelitian ini tidak terletak pada penolakan terhadap teori lama, melainkan pada penempatan teori secara kritis. Pan dan Kosicki tetap berguna untuk mengidentifikasi perangkat pembingkai, tetapi perlu dilengkapi dengan jurnalisme bencana untuk menilai koherensi etis dan dengan perspektif media digital untuk membaca provenance sumber, pembaruan, serta sirkulasi platform. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa atribut salience pada agenda setting tingkat kedua memiliki konsekuensi normatif. Ketika media menonjolkan jalan, pejabat, dan bantuan, publik tidak hanya diarahkan untuk memikirkan aspek tersebut, tetapi juga diarahkan untuk memahami siapa yang dianggap penting dan bentuk pemulihan apa yang diprioritaskan.

4.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian menuntut reorientasi liputan bencana dari jurnalisme kejadian menuju jurnalisme siklus bencana. Redaksi tidak cukup menugaskan reporter ketika banjir telah meluas dan jalan nasional lumpuh. Peliputan perlu disusun sejak prabencana melalui informasi kerentanan, kondisi tanggul, prediksi cuaca, jalur evakuasi, dan kesiapan posko; dilanjutkan pada fase darurat melalui verifikasi korban, kebutuhan logistik, dan informasi keselamatan; serta diteruskan pada fase pascabencana melalui pemulihan ekonomi, kesehatan mental, pendidikan, pertanian, kualitas infrastruktur, dan pertanggungjawaban kebijakan. Houston et al. (2019) menegaskan bahwa peran media mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan pembangunan ketahanan masyarakat.

Bagi *detik.com*, kekuatan utama yang perlu dipertahankan adalah kehadiran lapangan, pemetaan lokasi, penggunaan data, dan kemampuan menghadirkan cerita penyintas. Namun, ritme breaking news perlu dilengkapi dengan protokol verifikasi silang. Setiap klaim pejabat mengenai jumlah bantuan, progres tanggul, atau

perbaikan jalan sebaiknya diuji melalui penerima bantuan, ahli teknis, dan observasi lapangan. Ketika reporter menemukan fakta “jebol lagi” atau aspal baru rusak, redaksi perlu mengembangkan berita lanjutan yang membahas kualitas proyek, riwayat pemeliharaan, anggaran, dan pembagian kewenangan. Dengan demikian, misi “*Fastest, Trusted & Independent*” tidak berhenti pada kecepatan publikasi, tetapi diwujudkan sebagai kecepatan yang tetap kritis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi *suaramerdeka.com*, kedekatan regional perlu diubah menjadi kedekatan jurnalistik yang nyata. Jaringan lokal seharusnya memungkinkan reporter mengakses desa, posko, kelompok perempuan, lansia, penyandang disabilitas, petani, nelayan tambak, tenaga kesehatan, guru, dan relawan. Informasi rute alternatif tetap penting, tetapi perlu ditempatkan secara proporsional bersama informasi evakuasi, kebutuhan tiap posko, akses obat, air bersih, layanan trauma, dan skema pemulihan mata pencaharian. Filosofi setiti dan ngati-ati juga menuntut verifikasi lebih ketat terhadap video media sosial. Konten viral seharusnya diperlakukan sebagai petunjuk awal, bukan fakta final, sampai lokasi, waktu, sumber, dan konteksnya dapat dikonfirmasi.

Kedua media perlu membangun standar keragaman sumber. Dalam setiap berita bencana, sumber resmi diperlukan untuk data dan kebijakan, tetapi harus diimbangi dengan penyintas untuk pengalaman, ahli untuk penjelasan sebab, dan organisasi masyarakat untuk menilai distribusi bantuan. Keragaman ini bukan keseimbangan semu antara pendapat yang sama kuat, melainkan triangulasi fungsi pengetahuan. Pejabat mengetahui kebijakan, warga mengetahui dampak nyata, dan ahli dapat menilai kelayakan teknis. Kombinasi tersebut akan mengurangi budaya jurnalisme kutipan dan memperkuat akurasi substantif.

Redaksi juga perlu membedakan informasi yang sekadar informatif dari informasi yang dapat ditindaklanjuti. Menyebut 27 atau 31 titik pengungsian tidak cukup apabila lokasi rinci, kapasitas, kontak, kebutuhan, dan aksesnya tidak tersedia. Menyebut program trauma healing tidak membantu korban apabila jadwal dan mekanisme layanan tidak dijelaskan. Menyebut kebutuhan bibit padi atau pakaian dalam belum menjadi advokasi yang tuntas apabila kanal bantuan resmi tidak dicantumkan. Dalam situasi darurat, nilai sebuah berita ditentukan pula oleh kemampuan pembaca menggunakan informasi untuk menyelamatkan diri, memperoleh hak, atau membantu secara tepat.

Prinsip rehabilitasi perlu diterapkan melalui agenda liputan lanjutan. Media seharusnya kembali ke lokasi setelah air surut untuk memeriksa apakah bantuan benar-benar diterima, apakah sekolah dan fasilitas kesehatan berfungsi, bagaimana petani memulai kembali produksi, bagaimana warga membayar utang atau memperbaiki rumah, serta apakah trauma kelompok rentan ditangani. Few et al. (2021) menunjukkan bahwa pemulihan tidak berlangsung seragam karena dipengaruhi kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Karena itu, berita pemulihan tidak boleh hanya menampilkan jalan yang kembali dapat dilalui atau seremoni penyerahan bantuan.

Pada aspek visual, kedua media telah menunjukkan kehati-hatian dengan menghindari close-up penderitaan yang eksploitatif. Namun, perlindungan martabat tidak boleh berubah menjadi penghilangan korban dari cerita. Foto jarak jauh yang hanya menampilkan air, alat berat, dan pejabat dapat membuat penyintas menjadi latar anonim. Praktik visual yang lebih etis perlu memperlihatkan agensi warga: proses evakuasi yang dipimpin komunitas, cara keluarga mempertahankan kehidupan, upaya petani memulihkan lahan, atau partisipasi kelompok rentan dalam pengambilan keputusan. Persetujuan, konteks, dan keterangan foto harus dijaga agar visual tidak menjadi sekadar ilustrasi dramatis.

Fungsi *watchdog* memerlukan perencanaan redaksional, bukan hanya keberanian reporter individual. Redaksi dapat membuat daftar pertanyaan akuntabilitas untuk bencana berulang: siapa pengelola tanggul, kapan inspeksi terakhir dilakukan, berapa anggaran perbaikan, siapa kontraktornya, apakah rekomendasi evaluasi sebelumnya dijalankan, dan bagaimana mekanisme pengaduan warga. Data bencana perlu dihubungkan dengan arsip pemberitaan dan dokumen kebijakan agar exemplar masa lalu tidak hanya menjadi latar, tetapi menjadi alat evaluasi. Praktik ini akan menggeser pemberitaan dari laporan kerusakan menuju jurnalisme yang mencegah pengulangan kerusakan.

Implikasi praktis terakhir adalah kebutuhan pelatihan khusus jurnalisme bencana bagi reporter dan editor. Pelatihan perlu mencakup keselamatan lapangan, verifikasi konten digital, wawancara sensitif trauma, perlindungan kelompok rentan, analisis data kebencanaan, pemetaan sumber, penulisan informasi tindakan, dan investigasi tata kelola risiko. Protokol tersebut penting karena liputan bencana berlangsung di bawah tekanan waktu dan ketidakpastian. Standar yang telah disiapkan sebelum

krisis akan mengurangi ketergantungan pada siaran pers dan keputusan improvisasional yang dapat mengabaikan kepentingan penyintas.

4.3 Implikasi Sosial

Secara sosial, framing media menentukan bagaimana publik memahami siapa yang terdampak dan apa yang dianggap sebagai masalah utama. Ketika banjir terutama ditampilkan melalui jalan yang lumpuh, publik cenderung memaknai krisis sebagai gangguan perjalanan. Ketika berita berpusat pada jumlah pengungsi dan pengerahan aparat, publik dapat melihat bencana sebagai persoalan administrasi yang sedang diselesaikan negara. Ketika pengalaman Maskun atau Subadi diberi ruang, banjir dipahami sebagai ancaman terhadap keselamatan, martabat, pangan, dan mata pencaharian. Perbedaan tersebut penting karena perhatian publik, solidaritas, dan tuntutan kebijakan sering bergerak mengikuti aspek yang dibuat terlihat oleh media.

Bias mobilitas berpotensi membentuk hierarki korban. Pengendara, pemudik, dan pelaku logistik menjadi publik yang sangat terlihat, sementara warga yang kehilangan rumah, lahan, dan akses layanan dasar kurang memperoleh ruang. Secara sosial, hal ini dapat memengaruhi arah empati dan sumber daya. Publik mungkin lebih cepat menuntut pembukaan jalan dibandingkan pemulihan sawah atau dukungan psikososial. Jalan memang merupakan infrastruktur penting bagi ekonomi dan distribusi bantuan, tetapi pemulihan yang adil tidak dapat direduksi pada kelancaran kendaraan. Media perlu menunjukkan hubungan antara infrastruktur, kehidupan warga, dan ketimpangan kemampuan pulih.

Dominasi narasi pejabat juga memengaruhi posisi warga dalam ruang publik. Apabila penyintas hanya tampil sebagai penerima bantuan, mereka dipandang sebagai objek belas kasih, bukan warga negara yang memiliki hak untuk menilai layanan dan menuntut pertanggungjawaban. Pemberian ruang bicara mengubah posisi tersebut. Kesaksian korban dapat memperlihatkan kesenjangan antara klaim dan pengalaman, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak tercatat, serta memberi pengetahuan lokal mengenai risiko. Englund et al. (2022) menunjukkan pentingnya perlakuan bermartabat dan ruang yang layak bagi pengalaman penyintas. Dalam konteks Demak, suara warga penting untuk mengubah bantuan dari citra kebaikan institusi menjadi pemenuhan hak.

Kelemahan dalam membahas penyebab struktural dapat menurunkan literasi risiko masyarakat. Ketika media hanya menampilkan bencana sebagai kejadian yang muncul akibat faktor alam, publik berisiko mengalami proses normalisasi bencana, yaitu kondisi ketika kejadian berulang dipersepsikan sebagai sesuatu yang biasa tanpa mendorong kesadaran kritis terhadap faktor penyebab dan upaya pencegahannya. Dalam perspektif komunikasi risiko, media memiliki peran penting dalam membangun persepsi masyarakat mengenai ancaman (*risk perception*) dan kapasitas menghadapi bencana (*resilience*). Pemberitaan yang tidak memberikan konteks mengenai penyebab, kerentanan, dan langkah mitigasi dapat menyebabkan masyarakat lebih berfokus pada respons ketika bencana terjadi dibandingkan membangun kesiapsiagaan sebelum bencana berlangsung (Houston et al., 2019).

Bagi pemerintah, keterbatasan pemberitaan dalam mengungkap dimensi struktural bencana dapat mengurangi tekanan publik terhadap kebutuhan perubahan kebijakan. Media memiliki fungsi kontrol sosial (*watchdog function*) yang memungkinkan masyarakat memahami hubungan antara kejadian bencana dengan keputusan, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan risiko. Ketika pemberitaan lebih banyak berfokus pada tindakan tanggap darurat pemerintah seperti distribusi bantuan, evakuasi, atau rekayasa lalu lintas, tetapi kurang mengeksplorasi aspek evaluasi kebijakan, maka isu mengenai perbaikan sistemik seperti penguatan infrastruktur pengendali banjir, koordinasi pengelolaan sungai lintas wilayah, pemeliharaan tanggul, serta prioritas anggaran mitigasi berpotensi tidak menjadi agenda publik yang kuat.

Temuan ini sejalan dengan kajian disaster journalism yang menunjukkan bahwa pemberitaan bencana yang hanya berorientasi pada fase kejadian (*event-oriented reporting*) cenderung menghasilkan pemahaman publik yang terbatas karena mengabaikan proses yang menyebabkan suatu wilayah menjadi rentan terhadap bencana. Cottle (2009) menjelaskan bahwa media memiliki peran penting untuk menghubungkan peristiwa bencana dengan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang lebih luas. Sementara itu, Pantti et al. (2012) menekankan bahwa liputan bencana yang terlalu berorientasi pada tragedi dan respons langsung dapat menggeser perhatian publik dari persoalan kerentanan struktural menuju aspek dramatisasi peristiwa.

Fungsi kontrol media juga berpengaruh terhadap memori sosial. Banjir yang berulang memerlukan ingatan publik mengenai kegagalan sebelumnya, janji perbaikan, penggunaan anggaran, dan rekomendasi teknis. Apabila setiap kejadian diberitakan secara episodik, masyarakat mengalami krisis sebagai rangkaian peristiwa terputus. *Exemplar* masa lalu seharusnya digunakan untuk membangun kontinuitas dan mencegah normalisasi. Jurnalisme yang memiliki memori dapat menuntut pemerintah menjelaskan mengapa tanggul kembali gagal dan apakah pelajaran dari banjir sebelumnya telah diterapkan.

Di sisi lain, informasi praktis yang akurat dapat memperkuat resiliensi. Nomor posko, peringatan BMKG, rute evakuasi, lokasi layanan kesehatan, kebutuhan spesifik pengungsian, dan kanal bantuan resmi memungkinkan masyarakat bertindak berdasarkan pengetahuan. Namun, resiliensi tidak boleh dipahami sebagai kewajiban warga untuk bertahan sendiri. Media perlu menyeimbangkan narasi ketangguhan komunitas dengan pengawasan terhadap tanggung jawab negara. Pujian terhadap gotong royong tidak boleh digunakan untuk menutupi kegagalan sistem perlindungan dan mitigasi.

Implikasi sosial lainnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap media. detik.com membangun kepercayaan melalui kehadiran lapangan dan data, tetapi kepercayaan dapat melemah jika klaim resmi tidak diperiksa. *Suaramerdeka.com* memiliki modal kedekatan kultural dan identitas lokal, tetapi modal tersebut dapat tergerus jika publik melihat berita sebagai transkripsi unggahan media sosial atau panggung seremonial. Kepercayaan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan atau kedekatan merek, melainkan oleh konsistensi media dalam membedakan fakta terverifikasi, klaim institusi, dan pengalaman warga.

Kontribusi sosial jurnalisme bencana terletak pada kemampuannya menciptakan publik yang terinformasi, empatik, dan kritis. Publik yang terinformasi dapat mengetahui risiko dan pilihan tindakan. Publik yang empatik melihat penyintas sebagai subjek bermartabat. Publik yang kritis mampu menuntut akuntabilitas atas kegagalan berulang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua media telah menjalankan sebagian fungsi tersebut, tetapi belum mengintegrasikannya secara konsisten. Reorientasi menuju jurnalisme konstruktif bukan berarti mengurangi kritik atau hanya menyajikan cerita positif, melainkan menghubungkan masalah, bukti, suara warga, solusi, dan tanggung jawab secara berimbang.